

**MAKNA SOSIAL UANG TILANG BAGI  
MASYARAKAT DAN KEPOLISIAN**

(Studi Kasus : Tilang Tidak Resmi di Kota Padang)

**SKRIPSI**

Tugas untuk Mencapai Gelar Sarjana Ilmu Sosial  
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Andalas

Oleh:

**FADILA SARI**  
BP. 05 191 039



**JURUSAN SOSIOLOGI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG 2009**



## ABSTRAK

Fadila Sari. BP 05191039. Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang. Judul Skripsi: **Makna Sosial Uang Tilang Bagi Masyarakat dan Kepolisian (Studi Tilang Tidak Resmi di Kota Padang)**. Pembimbing I, Dra. Dwiyanti Hanandini, M.Si, Pembimbing II, Prof. Dr. Damsar, MA. Tebal Skripsi: 99 Hal, BAB I - BAB IV, 20 Buku, 3 Skripsi, 2 Jurnal Ilmiah dan 9 Data Internet.

Secara sosiologi, uang bukanlah hanya dipandang sebagai alat tukar, tapi juga digunakan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan baik sosial budaya dan psikologis. Selain itu uang tidak terlepas dari instrumen politik. Sanksi hukum tidak hanya berbentuk sanksi yang bersifat fisik, tapi juga berkaitan dengan sanksi yang bersifat denda, yaitu membayar sejumlah uang. Keteledoran terhadap sesuatu yang berkaitan dengan hukum dijatuhkan sanksi membayar sejumlah uang. Aktifitas tersebut ternyata telah mencapai kesemua sendi, mulai dari pelayanan umum, seperti membayar pajak, pelayanan di kepolisian sampai pengurusan tilang. Makna sosial terhadap uang tersebut juga di konstruksi oleh masyarakat dan kepolisian, khususnya berkaitan dengan uang tilang. Konstruksi makna sosial terhadap uang tersebut mempengaruhi perilaku mereka (masyarakat dan polisi) yang berkaitan dengan norma hukum, seperti perilaku sogok atau korupsi. Disamping itu, pemaknaan sosial terhadap uang juga dapat mempengaruhi perilaku orang dalam penggunaan tertentu berdasarkan pemaknaan yang ada terhadap uang. Oleh karena itu yang menjadi tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan makna sosial uang tilang bagi masyarakat dan kepolisian, mendeskripsikan proses transaksi uang tilang tidak resmi, mendeskripsikan penggunaan uang tilang yang tidak resmi bagi polisi.

Dalam penelitian ini digunakan teori Interaksionisme Simbolik. Teori interaksionisme simbolik melihat uang sebagai simpul banyak simbol. Keragaman makna tersebut dikonstruksikan dalam konteks hubungan sosial. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan tipe penelitiannya deskriptif. Dalam pengumpulan data digunakan teknik observasi dan wawancara mendalam. Pemilihan informan dengan menggunakan *purposive sampling* dan *snowballing*. Unit analisisnya adalah masyarakat dan aparat kepolisian, yaitu orang yang mengalami dan melakukan penilangan. Analisis data menggunakan metode deskriptif yakni data yang diperoleh dilapangan disusun secara sistematis dan disajikan secara deskriptif, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih tajam tentang fenomena yang terjadi dan akhirnya dapat memberi kesimpulan. Data yang didapat dianalisa dengan teknik triangulasi yakni sebagai pembanding dari data yang didapat.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa makna sosial uang tilang tidak resmi bagi masyarakat adalah sebagai uang damai, uang suap, uang haram, uang pelicin. Sedangkan bagi aparat kepolisian bermakna sebagai uang terima kasih, uang sukarela, uang penolong, uang titipan, dan uang haram. Uang tilang tidak resmi tersebut digunakan oleh aparat kepolisian untuk memenuhi kebutuhan pribadinya (rokok, bensin, makanan, pulsa), digunakan bersama dengan aparat polisi lain, diberikan kepada atasan yang sedang bertugas, digunakan untuk biaya operasional, dan untuk kebutuhan lainnya.

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Sejak zaman Soekarno, Orde Baru Soeharto hingga Era Reformasi, korupsi telah berkembang secara luar biasa yang mengakibatkan keterpurukan dan kebangkrutan negara serta hancurnya martabat bangsa di mata internasional. Pada tahun 2000 indeks korupsi di Indonesia adalah 1.7 dan mampu meningkat menjadi 2.4 pada tahun 2006. Tahun 2006 Indonesia berada pada urutan 130 dari 163 negara, bersama-sama dengan Azerbaijan, Burundi, Central African Rep., Ethiopia, Papua New Guinea, Togo, dan Zimbabwe. (<http://www.kapanlagi.com/berita.html>)

Indonesia juga menjadi negara terkorup ketiga di Asia Tenggara setelah Myanmar dan Kamboja yang berada pada peringkat 160 dan 152 dunia, dengan indeks korupsi masing-masing 1.9 dan 2.1. Dimana nilai indeks adalah antara 10 dan 1, dengan nilai mendekati 1 adalah negara dengan korupsi tinggi dan mendekati 10 adalah negara dengan korupsi rendah. Terjadinya penurunan tingkat korupsi ini masih belum signifikan karena Indonesia masih berada pada golongan negara-negara paling korup. (<http://www.kapanlagi.com/berita.html>)

*Transparency International* mengumumkan "Barometer Korupsi Global 2007", yang mengukur tingkat korupsi institusi-institusi negara dengan skala 0-5. Dimana skala mendekati nol merupakan skala terendah korupsi. Jadi semakin tinggi indeks, maka semakin dipersepsikan terkorup.

**Tabel 1.1 Barometer Korupsi Global 2007**

No.	Institusi-Institusi Negara	Skala
1.	Kepolisian	4.2
2.	Kehakiman	4.1
3.	Parlemen	4.1
4.	Partai Politik	4.0
5.	Lembaga Registrasi	3.8
6.	Badan Perpajakan	3.6
7.	Bisnis / Sektor Swasta	3.1
8.	Badan Infastruktur	3.1
9.	Militer	3.0
10.	Lembaga Pendidikan	3.0
11.	Lembaga Swadaya Masyarakat	2.8
12.	Pelayanan Kesehatan	2.8
13.	Media	2.5
14.	Lembaga Keagamaan	2.2

Sumber: TII 2007 ( Barometer Korupsi Global 2007 )

Berdasarkan data "Barometer Korupsi Global 2007" menunjukkan adanya 1 dari 10 orang harus membayar suap untuk mendapatkan pelayanan public. Praktik suap secara khusus menyebar dalam interaksi dengan polisi, lembaga peradilan dan lembaga pelayanan perijinan. Publik percaya bahwa partai politik, parlemen, polisi dan lembaga peradilan adalah institusi paling korup dalam Negara.

Dalam "Barometer Korupsi Global 2007" banyak responden mengungkapkan bahwa hubungan dengan lembaga kepolisian adalah yang paling bermasalah dalam membayar suap. Satu dari 4 anggota masyarakat yang pernah berhubungan langsung dengan polisi dimintai uang pelicin, dan 1 dari 6 orang mengaku pada akhirnya mereka membayar suap. Suap juga dilaporkan sebagai problem yang

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan makna sosial uang tilang tidak resmi bagi masyarakat dan kepolisian, proses transaksi uang tilang tidak resmi, dan untuk apa uang tilang yang tidak resmi tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan observasi dan wawancara kemudian dilakukan analisis data dimana penulis mencoba mendeskripsikan hasil penelitian ini maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut.

- I. Makna sosial uang tilang tidak resmi bagi masyarakat adalah:
    - a. uang damai karena uang diberikan pelanggar untuk mencapai penyelesaian tilang dan damai di tempat.
    - b. uang suap, karena uang diberikan masyarakat agar pelanggaran yang dilakukan masyarakat tidak diproses secara hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
    - c. uang pelicin, karena uang tersebut dapat memudahkan proses penyelesaian tilang/menjadi lancar.
    - d. uang haram, karena masyarakat menganggap uang yang telah diterima tersebut bukanlah menjadi hak individu aparat kepolisian
- bagi aparat kepolisian adalah :

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Afrizal. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Laboratorium Sosiologi Fisip Unand.
- Alatas, Hussein Syed. 1975. *The Sociology of Corruption*. (terj.) Jakarta : PT Matahari Bhakti.
- Damsar. 1997. *Sosiologi Ekonomi*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_. 2005. *Sosiologi Pasar*. Padang : Laboratorium Sosiologi Fisip Unand
- \_\_\_\_\_. 2006. *Sosiologi Uang*. Jakarta : Andalas university Press
- Johnson. P. Doyle, 1986. *Teori Sosiologi: Klasik dan Modern 2*. Terj. Robert M.Z. Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Maleong, Lexy.J. 1994. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remadja Rosdakarya.
- Nugroho, Heru. 2001. "Dari Krisis Legitimasi Sampai Memerangi Kolusi dan Korupsi" dalam *Menggugat Kekuasaan Negara*. Surakarta : Muhammadiyah University Press.
- \_\_\_\_\_. 2001. "Hapuskan Pungutan Tidak Resmi" dalam *Menggugat Kekuasaan Negara*. Surakarta : Muhammadiyah University Press.
- Nugroho, Heru. 2001. "Kekuasaan Uang dalam Masyarakat Modern" dalam *Menggugat Kekuasaan Negara*. Surakarta : Muhammadiyah University Press
- Nugroho, Heru. 2001. *Uang, Rentenir, dan Hutang Pinutang di Jawa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar (Anggota IKAPI).
- Paloma, M. Margaret. 2004. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta : PT Raja Grafindo